

Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Madang Suku Ii Kabupaten OKU Timur)

Oleh :

Mardiah Kenamon*

Dosen Prodi Akuntansi Universitas Baturaja

kenamonmardiah@gmail.com

Putri Triyana**

Prodi Akuntansi Universitas Baturaja

putritriyana052@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the influence of Implementation of Performance Based Budget on Organizational Performance of Regional Apparatuses (Case Study in Madang Suku II District of East OKU Regency). The results of this study are that there is a significant influence between the implementation of performance-based budget on the performance of regional apparatus organizations in Madang Suku II District, East OKU Regency. In this study the authors used a simple linear regression analysis tool. The population in this study was 24 people. Hypothesis testing is done using regression analysis. The test results show that the implementation of performance-based budgeting has a positive influence on the performance of local government organization. Based on the analysis using the hypothesis test (t-test) obtained t-count (17,789) > t-table (2.07387) then H_0 is rejected and H_a is accepted. This means that there is a significant influence between the implementation of performance-based budget on the performance of regional apparatus organizations in Madang Suku II District of East OKU Regency.

Keywords: Implementation of Performance-Based Budget, Organizational Performance of Regional Apparatuses

Pendahuluan

Latar Belakang

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-

departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta (Bastian, 2010:3). Anggaran sektor publik adalah suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan, dalam satuan moneter. Menurut Bastian (2010:202) anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau *item line budget*. Cara penyusunan anggaran tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak di periksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:80) ciri-ciri pendekatan tradisional ini adalah (1) disusun berdasarkan daftar belanja yang akan dilakukan oleh organisasi sehingga bentuknya terlihat seperti pos-pos belanja suatu organisasi. (2) bertujuan membatasi pengeluaran atau mengendalikan belanja organisasi. (3) umumnya bersifat inkremental. Dalam perkembangannya, muncullah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan.

Anggaran berbasis kinerja diperkenalkan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan

publik. Dengan pendekatan kinerja, organisasi akan lebih memperhatikan aspek pencapaian kinerjanya.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:82) ciri-ciri utama pada anggaran berbasis kinerja yaitu :

1. Menggolongkan anggaran berdasarkan program atau aktivitas.
2. Setiap program atau aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan.
3. Pada tingkat yang lebih maju, pendekatan inidicirikan dengan diterapkannya *unit costing* untuk setiap aktivitas. Dengan demikian, total anggaran untuk suatu organisasi adalah jumlah perkalian dari biaya standar per unit dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan pada periode mendatang.

Menurut Cahayani (2003:2) organisasi adalah suatu kerja sama suatu sekelempok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada.

Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah. Perangkat daerah terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Berdasarkan observasi awal penulis beberapa waktu yang lalu, dalam perencanaan dan penyusunan anggaran di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur telah menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Namun, belum secara maksimal. Karena dalam proses penyusunan terdapat kendala seperti: anggaran yang didapat kadang terbatas, kadang kala kurang, sehingga banyak menghambat kegiatan pemerintah

dan menghambat pelayanan masyarakat. sehingga dengan anggaran yang terbatas tersebut terkadang mengalami kesulitan dalam menyusun anggarannya. Beberapa instrumen kinerja yang seharusnya dijadikan salah satu unsur didalam perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis kinerja belum mampu diterapkan. Seperti penerapan persiapan dan pelaksanaan/implementasi anggaran berbasis kinerja belum terlaksana seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur tidak memiliki standar pelayan minimal maupun standar operasional prosedur yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus Di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur)**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Sektor Publik

Menurut Bastian (2010:191)

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu akan berdampak pada pemisahan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan.

Menurut Gade (2002:41), Definisi anggaran yang dibuat oleh *The National Committee On Governmental Accounting* dari Amerika Serikat yaitu ‘*A budget is plan of financial operation embodying an estimated of proposed means of financing them.*’ Jadi yang dimaksud oleh *The National Committee On Governmental Accounting* dari Amerika Serikat anggaran adalah bahwa suatu anggaran adalah rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu dan rencana penerimaan pendapatan untuk membiayainya.

Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Bastian (2010:202)

mendefinisikan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit

organisasi semata dan memakai pengukuran output (*output measurement*) sebagai indikator kinerja organisasi. Menurut Mardiasmo (2017:70-73) menyatakan bahwa indikator anggaran kinerja meliputi empat tahap yang terdiri atas :

1. Tahap persiapan anggaran (*preparation*)
2. Tahap ratifikasi (*approval/ratification*)
3. Tahap implementasi (*implementation*)
4. Tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting & evaluation*)

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Aliyudin (2016) kinerja organisasi perangkat daerah adalah organisasi pemerintah yang merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kinerja, akuntabilitas kerja instansi pemerintah serta monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya kinerja pemerintah yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab (tugas pokok) yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2013:67). Untuk lebih jelasnya indikator yang mempengaruhi kinerja khususnya kinerja organisasi perangkat daerah diantaranya :

1. Ekonomi : Ekonomi terkait dengan sejauhmana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efisiensi : Merupakan perbandingan output /input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektifitas : Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2017:121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2017:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari penguasa anggaran dan 19 kepala desa di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur dilakukan dengan berbagai cara seperti kuesioner (angket), dan observasi. Data primer diproses dengan cara :

- 1) Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2017:142).

2) Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono,2017:145).

Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna kuasa anggaran dan 19 kepala desa di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur. Metode pengambilan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling purposive*, yaitu teknik penentuan populasi dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu, karyawan yang tugasnya berhubungan dengan penyusunan anggaran di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut ada 24 orang yang tugasnya dalam penyusunan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. 1 orang kepala organisasi (camat)
2. 1 orang sekretaris camat
3. 1 orang kasi
4. 2 orang kasubag
5. 19 orang kepala desa

Sehingga apabila dihitung secara keseluruhan jumlah populasinya yaitu sebanyak 24 orang yang akan dijadikan responden.

Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan

menggunakan pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuncoro (2013:181) hasil validitas dari setiap pertanyaan dalam kuesioner dapat dilihat pada besarnya angka yang terdapat pada kolom corrected item total correlation. Dasar pengambilan keputusan :

- Jika r hitung positif serta r hitung $> r$ tabel, maka butir atau variabel tersebut valid. Namun jika r hitung positif serta r hitung $< r$ tabel, maka butir atau variabel tersebut tidak valid.
- Jika r hitung $> r$ tabel, tetapi bertanda negatif, maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Kuncoro (2013 : 181) metode yang digunakan dalam pengujian reabilitas ini adalah dengan menggunakan metode *cronbachs alpha* $> 0,600$. sesuai dengan kriteria perbandingan yang digunakan. Sebagai tafsiran umum, jika nilai reabilitas $> 0,6$ dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan reabil.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Siregar (2013:284) analisis regresi sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (independent) dan satu variabel tak bebas (dependent). Adapun rumus regresi linier sederhana yaitu:

$$Y = a + b, X$$

Dimana :

Y = variabel terikat

X = variabel bebas

a =konstanta

b = koefisien

Uji hipotesis (Uji-t)

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (studi kasus di kecamatan madang suku II kabupaten OKU timur).

Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Siregar (2013:290) maksud dari koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar sumbangan (kontribusi) yang diberikan variabel X terhadap perubahan variabel Y. Nilai koefisien determinasi dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

$$KP = (r)^2 \times 100\%$$

Dimana :

KP (Koefisien Penentu) = nilai koefisien determinasi

r^2 = nilai koefisien korelasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji validitas 24 responden diketahui bahwa nilai koefisien korelasi r hitung setiap pertanyaan dari masing-masing variabel lebih besar dari r tabel sehingga item pertanyaan yang digunakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2

Hasil Uji Reliabilitas		
Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Implementasi anggaran berbasis kinerja (X)	0.948	Reliabel
Kinerja organisasi perangkat daerah (Y)	0.940	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil penelitian koefisien alpha memiliki nilai lebih dari 0.60 hal ini menunjukkan bahwa variabel penelitian dapat dinyatakan reliabel dan memiliki nilai reliabilitas yang sangat tinggi.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Regresi Linier Sederhana Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-1.999	1.531	
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	.627	.041	.966

a. Dependent Variable: Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Sumber : data primer diolah, 2019

$$Y = -1.999 + 0.627X$$

Persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta bernilai -1.999, menunjukkan bahwa jika variabel Implementasi anggaran berbasis kinerja(X) tidak ada atau bernilai nol maka Kinerja organisasi perangkat daerah (Y) sebesar -1.999.
- Koefisien regresi variabel Implementasi anggaran berbasis kinerja(X) sebesar 0.627 artinya jika variabel Implementasi anggaran berbasis kinerja(X) mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) satuan, maka Kinerja organisasi perangkat daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0.627.

Penujian Hipotesis (Uji-t)

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Hipotesis (Uji-t) Coefficients^a

Model	T	Sig.
1 (Constant)	-1.478	.154
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	17.789	.000

t-hitung (17.789) > t-tabel (2.07387) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja organisasi perangkat daerah (studi kasus di kecamatan madang suku II kabupaten OKU timur).

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.967 ^a	.935	.932	1.92134

a. Predictors: (Constant), Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

b. Dependent Variable: Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Sumber : Data primer diolah, 2019

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0.935. Hal ini menunjukkan berarti 93.5% Kinerja organisasi perangkat daerah (studi kasus di kecamatan madang suku II kabupaten OKU timur) dipengaruhi oleh implementasi anggaran berbasis kinerja sedangkan sisanya 0.65% dipengaruhi oleh variabel lain yang disebutkan dalam penelitian ini seperti faktor ekonomi dan efisiensi.

1.1 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji hipotesis (uji-t) diperoleh t-hitung (17.789) > t-tabel (2.07387) maka H_0 ditolak dan H_a

diterima. Artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja organisasi perangkat daerah. Hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0.935. Hal ini menunjukkan berarti 93.5% Kinerja organisasi perangkat daerah dipengaruhi oleh implementasi anggaran berbasis kinerja sedangkan sisanya 0.65% dipengaruhi oleh variabel lain yang disebutkan dalam penelitian ini seperti faktor ekonomi dan efisiensi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori menurut Bastian (2010:202) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. Aliyudin (2016) kinerja organisasi perangkat daerah adalah organisasi pemerintah yang merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kinerja, akuntabilitas kerja instansi pemerintah serta monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya kinerja pemerintah yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga anggaran berbasis kinerja memiliki hubungan dengan kinerja organisasi perangkat daerah karena dalam membangun sistem penganggaran dengan kinerja maka pelaksanaan penyusunan anggarannya dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah yang baik.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Anggi Pratama Nst, Bagus Handoko (2018) melakukan penelitian tentang implementasi anggaran berbasis kinerja dalam

meningkatkan kinerja pemerintah daerah dilingkungan kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. Penelitian ini dilakukan pada seluruh kantor yang ada di Kecamatan Datuk Bandar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dikecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Data diambil menggunakan kuesioner yang didapat dari pengguna kuasa anggaran dan bendahara pada 5 kelurahan dan 1 kecamatan pada kecamatan Datuk Bandar kota Tanjung Balai yang kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa seluruh aktivitas anggaran berbasis kinerja sebagai bentuk peningkatan kinerja diseluruh instansi yang ada di kecamatan Datuk Bandar, kota Tanjung Balai telah sesuai atau berjalan dengan baik.

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dan hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang dibuktikan dengan hasil analisis regresi linier dengan probabilitas 0.000 berada dibawah tingkat signifikan (α) 5% atau 0,05.
2. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji hipotesis (uji-t) diperoleh $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dengan $t\text{-hitung} (17.789) > t\text{-tabel} (2.07387)$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan implementasi anggaran berbasis

kinerja terhadap Kinerja organisasi perangkat daerah.

3. Berdasarkan perhitungankoeffisiendeterminasi menunjukkan Kinerja organisasi perangkat daerah (studi kasus di kecamatan madang suku II kabupaten OKU timur) dipengaruhi oleh implementasi anggaran berbasis kinerja sebesar 93.5% sedangkan sisanya 6.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang disebutkan dalam penelitian ini seperti faktor ekonomi dan efisiensi.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk perangkat daerah Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur meskipun implementasi anggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan atau diterapkan, hendaknya perlu ditingkatkan kembali dengan cara peningkatan mengenai program anggaran penunjang pelayanan pada masyarakat yang sesuai dengan variabel anggaran berbasis kinerja yang sudah diimplementasikan pada kinerja organisasi perangkat daerah berjalan lebih baik lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat variabel lain diluar variabel penelitian terhadap kinerja organisasi perangkat daerah sebesar 6.5%. Maka disarankan pada peneliti selanjutnya untuk diteliti pengaruh variabel lain diluar variabel peneliti yang

mempengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah, contohnya pengendalian internal pada bidang penganggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Aliyudin, R.S. 2016. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus Pada Kecamatan Lelela Kabupaten Indramayu). Jurnal: Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi. Vol. 3(2):119-124.

Anugerahani, I.D dan Sentot I.W. 2013. *Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri)*. Jurnal : Jurnal Ilmu Manajemen. Vol. 2 (2):147-162).

Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta.

Buku Panduan Penulisan Proposal & Skripsi. 2018. Fakultas Ekonomi Universitas Baturaja. Baturaja, Universitas Baturaja.

Cahayani, A. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. PT Grasindo : Jakarta.

Kuncoro, M. 2013. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Edisi Keempat. Erlangga, Jakarta.

Mangkunegara, A.P. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mardiasmo, 2017. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta.

Gade, M. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Nordiawan, D dan Ayuningtyas H. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Selemba Empat, Jakarta.

Pratama, A dan Bagus H. 2018. *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Daerah Dlingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai*. Jurnal : Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Vol. 8 (2):15-25.

Riduan dan Sunarto. 2014. Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi Dan Bisnis. Bandung: Alfabeta

